

PERSOALAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Pendidikan kewargaan (*civic education*) pada dasarnya merupakan proses pencerdasan warga di ruang publik (*public-sphere*). Dengan begitu kata kuncinya adalah pencerdasan yang mencakup moral, intelektual dan spiritual, dan ruang publik dalam konteks negara (*state*) maupun masyarakat (*society*). Bagaimana seseorang menyadari kedinianya sebagai warga negara (dengan penghayatan hukum) dan warga masyarakat (dengan penghayatan etika sosial). Disebut sebagai penyayatan sebab norma tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi bersifat praksis di ruang publik. Ini terwujud melalui hubungan-hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural. Pendefinisian setiap interaksi sosial dapat memiliki dua muka, pertama dari sisi positif yaitu hubungan sosial yang akan dibangun atau dipelihara, atau sisi sebaliknya untuk menghancurkan hubungan sosial.

Dari sini cara pandang atas proses pendidikan kewargaan dapat dimulai dengan kerangka konseptual tentang hegemoni di satu pihak atau pembebasan pada pihak lain. Paradigma pertama, proses pendidikan pada dasarnya merupakan upaya untuk membawa warga kepada nilai yang harus dimenangkan dalam konteks kehidupan di ruang publik, biasa dikerjakan dalam propaganda ideologis. Sedang yang kedua adalah upaya menjaga agar publik dapat memiliki otonomi dan independensi dengan menghidupkan kecerdasan dalam kehidupan di ruang publik.

Pendidikan pada paradigma kedua dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara idealisasi ruang publik sebagai ruang dengan norma kebebasan dan netralitas, rasionalitas dan kecerdasan, dan orientasi pada kemanusiaan. Ruang kebebasan dan netralitas dijaga dengan menjauhkan dominasi dan monopoli kekuasaan negara dan pasar, basis rasionalitas dan kecerdasan dijalankan dengan mengembangkan kultur toleransi dan anti kekerasan dalam interaksi sosial, dan orientasi derajat kemanusiaan diwujudkan melalui pilihan wacana publik yang relevan dalam memerangi konstruksi sosial yang merugikan hak azasi.

(2)

Media massa dapat berperan dalam proses pendidikan kewargaan sepanjang memiliki orientasi ideal atas ruang publik. Fungsi institusional media semacam ini dimulai dari visi dan misi yang mendasari seluruh proses operasi kerja. Adapun visi dan misi, merupakan hal fundamental yang menjadi dasar bagi setiap perilaku dan hasil kerja aktor sosial yang mengambil jalan sebagai agen perubahan. Karenanya dapat dipertajam dengan melihat bahwa kedua aspek ini merupakan urutan logis, karena adanya visi, maka seseorang menjalankan misi yang relevan. Dengan begitu dari visi, dijalankan suatu misi, dengan standar kerja, untuk mendapatkan hasil kerja yang berkesesuaian dengan suatu visi.

Visi merupakan gambaran ideal yang dibentuk mengenai diri sendiri maupun ruang publiknya. Dengan bahasa lain visi dapat diproyeksikan sebagai ruang publik yang bersifat *real* dan ideal. Visi ini akan menjadi lebih jelas manakala dihadapkan dengan kehidupan di bawah standar dari kondisi faktual masyarakat. Katakanlah misalnya masyarakat yang menjadi sektarian, atau masyarakat negara atau komunal yang bersifat fasis, dari sini

* Disampaikan pada diskusi *Pers dan Pendidikan Kewarganegaraan: Upaya Membangun Karakter Bangsa*, Dewan Pers, Jakarta 29 Mei 2007

kemudian idealisasi dapat dirumuskan. Visi sebagai “ideologi” atau “roh” yang menggerakkan seorang aktor sosial memberi pemaknaan (*meaning*) bagi tindakan dan hasil kerjanya.

Untuk mewujudkan idealisasi itu, dijalankan suatu misi. Misi adalah hal yang mau dikerjakan. Lewat misi ini hasil kerja dapat ditempatkan kelak. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari norma perilaku untuk menghasilkan kerja berkonteks pada visi dan misi tersebut. Demikianlah visi dan misi menjadi landasan dari seluruh standar tindakan dan nilai hasil kerja aktor sosial. Seperti sikap terhadap masyarakat, yang menjadi dasar dalam nilai hasil kerja dalam konteks sosial. Pemaknaan hasil kerja dalam konteks sosial ini perlu ditempatkan menjadi landasan dalam proses menghadirkan media dalam masyarakat.

Secara praksis, orientasi diwujudkan melalui sudut pandang (*angle*) yang mendasari perspektif dalam menghadapi fakta. Makna yang dijadikan acuan dalam menilai suatu fakta selamanya berada dalam konteks ruangnya. Artinya fakta bukanlah suatu ranah yang steril. Sementara konteks lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah yang bersifat paradigmatis, yaitu asumsi tentang ruang publik yang menjadi “tempat” bagi suatu fakta, untuk kemudian dipertalikan dengan makna yang ingin ditampilkan. Seorang aktor sosial yang memandang ruang publik sebagai ajang yang diisi oleh pihak-pihak yang berperang untuk memperebutkan dominasi secara fisik, dengan sendirinya akan melihat fakta secara berbeda, dan dalam misinya akan memilih dengan memposisikan diri kepada salah satu pihak.

(3)

Dalam konteks Indonesia, posisi seorang aktor sosial dapat dilihat dalam kerangka besar ruang publik yang diisi dengan kegiatan/praktik sosial warga dengan fakta agama, suku dan kekerasan. Untuk memahami makna fakta di ruang publik adalah melalui oposisi binarnya, dapat dirangkumkan sebagai berikut:

NEGATIF	KONFLIK	FAKTA	DAMAI	POSITIF
Sektarian	↔↔	AGAMA	→→	Toleran
Eksklusif	↔↔	SUKU	→→	Inklusif
Pemaksaan	↔↔	INTERAKSI SOSIAL	→→	Rasionalitas

Visi yang merupakan gambaran tentang posisi diri dalam ruang publik dengan pemaknaan yang bersifat binari, akan melahirkan misi yang akan diwujudkan dari pilihan di antara kutub binari tersebut. Aktor sosial dapat dibedakan dari orientasinya dalam menghadapi dikhotomis dari suatu binari makna. Dalam menghadapi fakta agama, apakah dia akan menjadi toleran ataukah sektarian, dalam fakta suku apakah dia inklusif ataukah eksklusif, dan fakta interaksi sosial apakah dia memilih jalan rasionalitas atau pemaksaan (*coercion*) dengan kekerasan fisik maupun simbolik?

(4)

Jurnalisme konvensional mengutamakan konflik, sebaliknya dengan jurnalisme perdamaian, perspektif ini akan mewarnai operasi teknis dalam memilih fakta dan menyajikan informasi. Keberadaan media massa di ruang publik hanya dapat diproyeksikan dengan menempatkan dalam dinamika *real* yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan kata lain, informasi sebagai fakta media merupakan ekstensi dari realitas masyarakat. Peran media penyiaran publik dalam masalah multietnis dan multigolongan dengan sendirinya harus dilihat dari pangkalnya, sejauh mana aktor sosial yang menyelenggarakan media tersebut memiliki visi dan misi yang dimaksudkan sebagai pendekatan multi-kultural. Sebab masalah krusial yang

perlu dihayati oleh pengelola media massa di Indonesia adalah kondisi multi-kultural dalam ruang publiknya.

Kondisi multi-kultural merupakan fokus perhatian di berbagai negara, sehingga pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat tempatan memiliki kepedulian dan kebijakan yang serius dalam strategi kultural. Pendekatan multi-kultural diperkembangkan untuk menghadapi masalah-masalah di berbagai negara multi-bangsa (*multi-nation states*) atau negara banyak-suku (*poly-ethnic states*). Masalah sosial muncul akibat varian komposisi warga masyarakatnya. Asumsi dasar dalam pendekatan multi-kultural adalah adanya dominasi secara kultural terhadap kelompok minoritas. Dengan kata lain perhatian ditujukan terhadap proses marginalisasi, sehingga perlu dilakukan langkah strategis untuk mengangkat fakta dari kelompok yang dimarginalkan, sebagai operasi yang biasa disebut sebagai *affirmative action*.

Lingkup dari pendekatan multi-kultural adalah entitas negara-bangsa, dengan melihat interaksi antar kelompok kultural di dalamnya. Karenanya dalam konteks ini tidak relevan melihat pengaruh kultur asing yang memmarginalkan kultur domestik. Sebab masalahnya adalah, ancaman terbesar bagi kelangsungan dan kehidupan beradab suatu negara-bangsa adalah kondisi antar kelompok kultural di dalamnya. Kondisi multi-kultural bersifat internal ini merupakan faktor yang menjadikan suatu komunitas negara sangat rentan (*vulnerable*) karena adanya ancaman potensi konflik sosial. Sering kondisi rentan ini dipersalahkan kepada media massa yang dianggap menyuburkan konflik. Persoalannya dapat dilihat secara luas, sebab media massa pada dasarnya menyampaikan informasi yang berasal dari ruang publik, untuk dikembalikan ke ruang publik pula. Boleh jadi kesadaran tentang masalah multi-kultural masih rendah, sebab bahkan dalam skala makro belum ada strategi yang diwujudkan sebagai kebijakan negara dengan pendekatan multi-kultural. Dari strategi kultural bersifat makro, baru dari sini kemudian pendekatan multi-kultural menjadi dasar orientasi bagi institusi-institusi sosial, seperti institusi pendidikan, bisnis, partai politik, dan media massa tentunya.

(5)

Kesadaran tentang pendekatan multi-kultural diharapkan dapat menjadi “kurikulum” dalam pendidikan kewargaan sehingga ada gerak serentak dalam memahami dan mengapresiasi perbedaan-perbedaan di ruang publik, serta sikap empati dan simpati terhadap setiap kelompok minoritas atau termarginal. Apakah media massa dapat menjalankan peran semacam ini, tentunya harus dikembalikan pada pertanyaan: sejauh mana visi dan misi yang mendasari media tersebut memang bertolak dari perspektif multi-kultural.

Untuk itu sudah selayaknya kehadiran media yang secara ideal menetapkan fungsinya berorientasi kepada pengembangan makna di ruang publik, bertolak dengan landasan pendekatan multi-kultural. Orientasi media untuk mewujudkan dan memelihara idealisasi ruang publik dengan menempatkan perspektif dalam sudut pandang dalam pendekatan multi-kultural, maka media massa akan memberikan kontribusinya bagi kehidupan publik yang lebih baik. Untuk itu media perlu merumuskan orientasi penajaman fungsinya, dengan rumusan orientasi media dan pelaksanaan kebijakan media untuk menjalankan misi bersifat imperatif dengan fungsi pendidikan kewargaan. Dengan kata lain, orientasi yang menjadi dasar dalam sudut pandang dalam liputan, yang dirumuskan dalam buku pedoman (*reference book/style book*) dari organisasi media.